

PENGARUH KONFLIK PERBEDAAN PILIHAN POLITIK TERHADAP HARMONISASI KELUARGA

Risan Pakaya, Sofyan AP Kau

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : pakayartisan@gmail.com, sofyanapkau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam keluarga akibat perbedaan pilihan politik, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis serta menganalisis dampak dari konflik tersebut terhadap keharmonisan keluarga, termasuk bagaimana konflik tersebut memengaruhi komunikasi, kedekatan emosional, dan stabilitas relasi antaranggota keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana konflik akibat perbedaan pilihan politik memengaruhi harmonisasi dalam kehidupan keluarga. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber asli di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, tesis, jurnal, artikel, serta hasil penelitian terdahulu tentang konflik perbedaan pilihan politik terhadap harmonisasi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang timbul dalam keluarga meliputi pertengkaran verbal, sikap saling menjauhi, pengabaian emosional, hingga pemutusan komunikasi sementara antaranggota keluarga. Konflik tersebut berdampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga, seperti menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya ketegangan psikologis, berkurangnya rasa saling percaya, serta melemahnya ikatan emosional dan solidaritas keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan politik agar keluarga tetap menjadi tempat yang damai, saling mendukung, dan penuh kasih sayang.

Kata Kunci: *Perbedaaan Pilihan, Konflik Politik, Harmonisasi Keluarga.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan rakyat sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah melalui lembaga legislatif yang diberikan mandat oleh rakyat untuk menjamin perlindungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan harapan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila dapat direalisasikan dalam seluruh upaya penyelenggaraan negara, termasuk upaya dalam sistem politik dan budaya politik Indonesia. Tumbuh kembang dan majunya perpolitikan dalam sebuah negara,

juga dipengaruhi oleh partisipasi dan keikutsertaan dari elemen masyarakat, baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung.¹

Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik di Indonesia merupakan wajah dari tegaknya demokrasi, serta salah satu aspek penting dalam perkembangan dan kemajuan demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yakni kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terkait politik, serta perhatian masyarakat terhadap lingkungan dimana dia hidup, atau juga dipengaruhi oleh sosial-ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi dari masyarakat.²

Indonesia sebagai negara demokrasi, menjadikan demokrasi sebagai suatu proses untuk merajut semangat kebersamaan demi mewujudkan kemaslahatan dalam berpolitik. Persoalan politik merupakan persoalan yang menjadi perhatian bersama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak dapat dihindari bahwa interaksi keseharian masyarakat akan senantiasa bersentuhan dengan masalah-masalah politik, sehingga percakapan dan interaksi dalam ruang demokrasi ini juga akan menghadirkan ragam perbedaan antar warga negara baik perbedaan dalam berpendapat, maupun perbedaan dalam mengambil sikap.³

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam perpolitikan suatu negara sangat berpengaruh positif bagi kemajuan negara tersebut. Namun hal-hal yang mempengaruhi keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam perpolitikan ini juga tidak jarang dapat memicu konflik antar sesama, baik konflik antar para elit politik pada tataran nasional, hingga konflik pada lapisan masyarakat kecil berskala desa, dan bahkan sampai pada satu komunitas kecil yang bernama keluarga. Konflik yang terjadi ditengah masyarakat bahkan ditengah keluarga sebab perbedaan pilihan politik ini sudah menjadi konflik ceremonial, atau konflik yang pasti akan terjadi ketika ada pesta demokrasi yaitu pemilu, mulai dari pemilihan presiden bahkan sampai pada pemilihan kepala desa.

¹ Khoirul Saleh dan Achmat Munif, *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*, Jurnal Addin Vol. 9, No. 2, 2015, h. 325-328

² Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Bawaslu Vol.3 No. 3 2017, h. 308-309

³ Nasaruddin dan Bahtiar, *Pemilihan Kepala Daerah dan Disharmonisasi Keluarga (Studi Kasus pada Pilkada Kabupaten Muna Barat Tahun 2017)*, Jurnal Neo Societal, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 254

Pada dasarnya perbedaan merupakan *fitrah* yang menggabarkan keragaman serta dapat memperkaya *hasanah* keilmuan apabila manusia dapat membingkainya dalam satu prinsip kebersamaan untuk mencapai kemajuan yang sama dicita-citakan. Oleh karena konflik perbedaan pilihan politik yang terjadi dilingkungan masyarakat apalagi ditengah keluarga, sangat disayangkan mengingat keluarga merupakan salah satu unit daripada sistem social.⁴

Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari banyak orang yang masing-masing memegang kedudukan dan peranan tertentu. Sebuah keluarga terbentuk dari dua orang yang sepakat untuk hidup bersama dengan ikhlas dan setia, atas dasar keimanan yang ditegaskan dalam perkawinan, atas dasar cinta kasih, dengan tujuan untuk saling menyempurnakan dan memperbaiki kehidupan.⁵ Keluarga merupakan sebuah kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki aturan dan kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas seksual, membesarkan dan mendidik anak, serta mengatur tata cara pernikahan dan menentukan hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁶

Keluarga sangat berperan penting serta aktif dalam membentuk dan mempengaruhi individu, mulai dari tujuan hingga muatan interaksi kehidupan social. Singkatnya, keluarga juga bisa diartikan sebagai dua atau lebih orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, maupun adopsi, yang membentuk unit sosial dengan struktur dan hubungan erat, yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.⁷ Keluarga yang menjadi tempat dimana dibentuknya nilai, keyakinan, dan pola pikir yang menjadi penentu baik dan buruknya proses interaksi, merupakan lingkungan yang paling akrab dengan individu. Sehingga perbedaan pilihan politik dalam sebuah keluarga, dapat memicu konflik yang tentunya berdampak negatif dan

⁴ Muhil Mubarak, *Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik Perspektif Teori Konflik (Studi Di Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya)*, Tesis, Program Pasca Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019, h. 2-3

⁵ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994, h. 152.

⁶ Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 987.

⁷ Nandorari Saptienly Buling, Aloysius L.S. Soesilo, *Komunikasi dalam Keluarga Tradisional Yang Mengalami Konflik Karena Pilkada di Kabupaten Alor*, Jurnal Psikohumanika, Vol. 13, No 1, 2021, h. 3.

merugikan, karena dapat menyebabkan disharmonisasi dalam hubungan kekeluargaan.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam keluarga akibat perbedaan pilihan politik, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis. Dalam situasi di mana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, perbedaan pandangan politik sering kali tidak hanya berdampak di ruang publik, tetapi juga menyusup ke dalam relasi privat seperti keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari konflik tersebut terhadap keharmonisan keluarga, termasuk bagaimana konflik tersebut memengaruhi komunikasi, kedekatan emosional, dan stabilitas relasi antaranggota keluarga.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana konflik akibat perbedaan pilihan politik memengaruhi harmonisasi dalam kehidupan keluarga. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber asli di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, Tesis, jurnal, artikel, serta hasil penelitian terdahulu tentang konflik perbedaan pilihan politik terhadap harmonisasi keluarga.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi beberapa tahap utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konflik perbedaan pilihan politik terhadap harmonisasi keluarga.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Konflik dalam Keluarga Akibat Perbedaan Pilihan Politik.

Perbedaan sikap dan pilihan politik yang dapat menghadirkan konflik dalam masyarakat atau dalam keluarga, dapat dihindari apabila masyarakat saling pengertian, toleransi, dan menjalin komunikasi yang baik. Respon positif antar warga negara khususnya antar anggota keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah negara terkait perbedaan pilihan politik yang terjadi, akan berdampak baik terhadap perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apabila tidak

⁸ Moch. Azis Qoharuddin, *Pemilu Dan Konflik Dalam Keluarga: Menjaga Harmoni Dalam Perbedaan Pendapat*, Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences, Vol. 3, No. 3, 2022, h. 381

adanya kesadaran kolektif dari warga negara terhadap perbedaan pilihan politik yang merupakan *fitrah* dari sebuah negara demokrasi.

Perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain dalam upaya memperoleh atau menjaga sumber daya yang dikuasai negara, juga kemudian memicu konflik dan gejolak politik antar organisasi politik. Kelompok politik yang mempunyai kapasitas dan kekuatan besar, cenderung mengeksploitasi kelompok politik yang lain dengan mengkhianati posisi sebenarnya. Hal ini jelas tidak dibenarkan dalam konstitusi, karena tergolong perbedaan yang bersifat merusak. Hal tersebut juga tidak dibenarkan dalam agama, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوْا۟

Termahnya:

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil”.⁹

Konflik politik dalam keluarga bisa bersifat terbuka, seperti perdebatan dan pertengkaran. Atau pun tersembunyi, seperti saling menghindar atau menjaga jarak emosional. Jika tidak ditangani dengan bijak, konflik ini bisa berkembang menjadi keterasingan antar anggota keluarga dan menciptakan polarisasi di dalam rumah tangga.¹⁰ Bagian ini akan mengulas berbagai bentuk konflik yang umum terjadi akibat perbedaan pilihan politik dalam keluarga, baik dalam konteks keluarga inti maupun keluarga besar, dengan tujuan memahami dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Karena itu, memahami bentuk-bentuk konflik yang muncul akibat perbedaan politik menjadi penting, sebagai dasar untuk menemukan solusi yang dapat menjaga keutuhan dan kedekatan dalam keluarga.

1) Konflik Verbal atau Debat Tajam

Konflik verbal merupakan bentuk konflik yang paling sering terjadi dalam keluarga saat terjadi perbedaan pilihan politik. Konflik ini muncul ketika anggota keluarga terlibat dalam diskusi yang awalnya bersifat argumentatif dan rasional, namun kemudian berkembang menjadi perdebatan yang emosional. Topik-topik

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

¹⁰ Arif Sugitanata & Muannif Ridwan, *Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik*, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 4, no. 1 (2024).

seperti partai politik, calon presiden, atau isu-isu kebijakan publik sering menjadi pemicu utama perdebatan ini. Awalnya, diskusi dapat berlangsung dalam kerangka saling berbagi pandangan. Namun, karena ikatan emosional dalam keluarga sangat kuat, perbedaan pendapat yang tidak segera diatasi dengan komunikasi yang sehat dapat memicu ketegangan. Dalam banyak kasus, upaya saling meyakinkan berubah menjadi *verbal attacking* atau serangan personal. Misalnya, pernyataan seperti “ko tidak berpikir logis,” atau “pendapatmu tidak masuk akal,” menjadi bentuk penghinaan terselubung yang memicu kemarahan. Sering kali, pihak yang merasa tersudut akan bersikap defensif dan mulai menyerang balik. Hal ini membuat suasana keluarga menjadi tidak nyaman, bahkan memicu permusuhan berkepanjangan. Ketika intensitas perdebatan meningkat dan berlangsung terus-menerus, hubungan keluarga bisa terganggu secara signifikan.

2). Sikap Diam (Silent Treatment)

Sikap diam atau *silent treatment* adalah bentuk respons yang dipilih oleh beberapa anggota keluarga untuk menghindari konfrontasi langsung saat terjadi perbedaan pilihan politik. Alih-alih menghadapi perbedaan tersebut secara terbuka melalui diskusi atau debat, anggota keluarga yang merasa tidak nyaman atau takut konflik memilih untuk menarik diri secara emosional dan fisik dengan tidak berbicara atau berinteraksi secara intens dengan pihak lain.

Meskipun tampak seperti ketenangan, sikap diam ini sebenarnya merupakan manifestasi dari konflik pasif yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga secara signifikan. Konflik ini tidak disuarakan secara eksplisit, sehingga dinamakan **konflik laten** dalam teori konflik sosial. Konflik laten ini menimbulkan ketegangan psikologis yang terus membesar tanpa ada penyelesaian yang nyata, dan dapat menimbulkan rasa cemas, kesepian, hingga ketidakpercayaan antar anggota keluarga.

3). Pengucilan atau Menjauhkan Diri

Pengucilan atau menjauhkan diri merupakan bentuk konflik di mana salah satu atau beberapa anggota keluarga secara sengaja mengurangi atau menghindari interaksi sosial dengan anggota keluarga lain yang memiliki pilihan politik berbeda. Bentuk konflik ini seringkali muncul terutama pada momen-momen kritis seperti menjelang atau setelah peristiwa politik besar, misalnya pemilihan umum.

Menjauhkan diri ini bisa berupa menghindari pertemuan keluarga, mengurangi komunikasi, hingga tidak berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang sebelumnya

rutin dilakukan. Dampaknya, hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang dan suasana kekeluargaan yang hangat berubah menjadi dingin dan formal. Kehilangan keintiman emosional ini memperlemah ikatan keluarga dan mengurangi rasa kebersamaan. Menurut Arif Sugitanata dan Muannif Ridwan, konflik dengan pola penghindaran seperti ini dapat mengganggu struktur sosial keluarga secara keseluruhan, terutama menghambat interaksi dan komunikasi yang esensial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga.¹¹ Selain itu, gangguan pada rutinitas keluarga yang biasa berjalan harmonis juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan stres bagi seluruh anggota keluarga, memperburuk suasana dan menciptakan jarak psikologis yang sulit diatasi jika tidak segera dikelola.

4). Konflik Struktural antara Generasi

Konflik struktural antara generasi terjadi ketika perbedaan pilihan politik muncul antara orang tua dan anak, atau antar anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Konflik ini tidak hanya sebatas perbedaan pendapat biasa, tetapi sering menyentuh aspek yang lebih mendalam, seperti nilai-nilai ideologi, pandangan hidup, dan preferensi identitas politik yang melekat pada setiap generasi.

Perbedaan ini dapat diperparah oleh pengalaman sosial yang berbeda, di mana generasi tua dan muda tumbuh dalam konteks sosial, budaya, dan media yang berlainan. Generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada media sosial dan sumber informasi yang dinamis, sementara generasi tua lebih banyak mengandalkan media tradisional dan pengalaman langsung. Ketidakseimbangan konsumsi media politik ini menyebabkan sudut pandang yang berbeda dan sulit untuk disatukan dalam diskusi politik keluarga.

Menurut Komarudin dan Rahmat, ketidakseimbangan ini menjadi faktor penting dalam memperkuat ketegangan generasi dalam keluarga, karena setiap generasi merasa benar dan sulit menerima perspektif generasi lain.¹² Kondisi ini membuat konflik tidak hanya berupa perbedaan pendapat, tetapi berpotensi memicu ketidakpercayaan dan kekecewaan yang mendalam antara anggota keluarga.

¹¹ Arif Sugitanata & Muannif Ridwan, *Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik*, Jurnal Sosio logi Reflektif, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 59.

¹² Komarudin, & Rahmat, *Dinamika Konflik Generasi dalam Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45-47.

5). Membatasi Topik Sensitif pada Momen Rentan

Dinamika keluarga yang mengalami perbedaan pilihan politik, salah satu strategi yang efektif untuk menjaga keharmonisan adalah dengan membatasi pembicaraan tentang topik politik pada momen-momen yang dianggap rentan, seperti saat makan bersama, hari raya, atau perayaan keluarga lainnya. Langkah ini bukan berarti menghilangkan kebebasan berpendapat, melainkan mengedepankan prioritas menjaga suasana emosional yang kondusif agar interaksi antar anggota keluarga tetap harmonis. Pembatasan pembicaraan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian konflik sementara, guna menghindari perdebatan yang dapat memicu ketegangan berlebih pada saat yang seharusnya menjadi waktu berkumpul dan merayakan kebersamaan. Dengan cara ini, keluarga dapat fokus pada aspek-aspek positif dari hubungan mereka, menjaga rasa saling menghormati, dan memperkuat ikatan emosional.

Perbedaan pilihan politik dalam keluarga tidak hanya sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan dapat memicu berbagai bentuk konflik yang beragam dan berpotensi merusak keharmonisan keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Konflik tersebut dapat muncul dalam bentuk debat verbal yang tajam, sikap diam yang menyimpan ketegangan psikologis, hingga pengucilan dan menjauhkan diri yang mengganggu ikatan emosional dan rutinitas keluarga. Selain itu, perbedaan pilihan politik antar generasi menimbulkan konflik struktural yang lebih kompleks, karena melibatkan perbedaan nilai ideologi dan cara pandang terhadap dunia yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan konsumsi media yang berbeda. Dalam kondisi yang lebih parah, konflik politik dapat mengancam ikatan emosional keluarga secara serius, bahkan berujung pada putusnya komunikasi antar keluarga besar, atau bahkan perceraian pada keluarga inti. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk mengenali berbagai bentuk konflik ini dan mengembangkan strategi pengelolaan yang bijaksana agar perbedaan politik tidak merusak keharmonisan dan keutuhan keluarga.

2. Dampak Konflik Perbedaan Pilihan Politik Terhadap Keharmonisan Keluarga.

Keharmonisan dalam keluarga memfasilitasi pembentukan hubungan yang lebih dalam dan bermakna serta menciptakan ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Dalam keluarga harmonis, pembelajaran penyelesaian konflik yang sehat dan konstruktif merupakan pembelajaran berharga yang menekankan pentingnya

komunikasi, empati dan kompromi. Selain itu, suasana harmonis dalam keluarga menumbuhkan lingkungan yang ideal untuk belajar dan tumbuh bersama.

Komunikasi yang sehat merupakan kunci pertama dalam meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi penyelesaian masalah secara bersama-sama. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menghadapi persoalan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

٣٨

Terjemahnya:

“dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”¹³

Dalam keluarga, musyawarah menjadi ruang partisipatif di mana setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Dalam konteks perbedaan pandangan politik, musyawarah memungkinkan setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut atau terintimidasi, sehingga konflik tidak berubah menjadi permusuhan yang merusak.

Beberapa kasus ekstrem, konflik politik bahkan bisa menyebabkan disintegrasi keluarga, seperti saling memutus komunikasi, hingga memutus hubungan kekeluargaan secara sosial. Berikut beberapa kasus perbedaan pilihan politik yang terjadi di Provinsi Gorontalo:

1. Seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang merelokasi dua makam, sebab almarhum merupakan pendukung partai politik yang bersebrangan dengan partai politik yang didukung oleh keluarga pemilik tanah pemakaman.¹⁴
2. Calon anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Hanura, Fadli Dunga, membantah telah menarik kembali bantuan tandon air dari warga bernama Abdullah Usman (61) karena perolehan suara yang rendah pada Pemilu 2024. Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan tim sukses untuk mengambil kembali bantuan tersebut. Menurut Fadli, Abdullah sendiri yang

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁴ Liputan 6, Cerita dibalik Pembongkaran Makam karena Beda Pilihan Caleg di Gorontalo, (<https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/3869358/cerita-di-balik-pembongkaran-makam-karena-beda-pilihan-caleg-di-gorontalo>), diakses pada tanggal 31 Mei, 2024.

mengembalikannya karena suara yang dijanjikan tidak tercapai. Anak Abdullah, Ariyanto, menyebut bantuan itu ditarik setelah Fadli hanya mendapat satu suara dari 15 yang dijanjikan. Fadli menyatakan pemberian bantuan dilakukan karena rasa iba terhadap Abdullah yang merupakan imam masjid, bukan karena janji suara. Tim sukses Fadli, Halim R. Padi, mengaku dirinya yang menarik kembali tandon air tanpa arahan Fadli karena tidak terpenuhinya perjanjian jumlah suara. Ariyanto membantah adanya kesepakatan politik dan menayangkan tindakan penarikan bantuan yang menurutnya hanya pemberian biasa tanpa syarat.¹⁵

3. Darmawan Duming, calon anggota legislatif DPRD Kota Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gorontalo atas dugaan praktik politik uang. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Menurut pengakuan Welly Ismail, seorang warga setempat, ia menerima uang sebesar Rp75 juta dari Darmawan dengan maksud untuk dibagikan kepada sekitar 500 pemilih, masing-masing menerima Rp100.000 hingga Rp150.000. Namun, dua hari setelah pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024, Darmawan diduga mendatangi rumah Welly dan menuntut agar uang tersebut dikembalikan. Welly menyatakan bahwa Darmawan mengamuk, menyita sepeda motornya sebagai jaminan, dan memaksanya menandatangani surat pernyataan pengembalian uang. Merasa dipermalukan dan diancam, Welly pun melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Gorontalo. Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Sukrin Saleh Thaib, membenarkan bahwa laporan telah diterima.¹⁶
4. Herson Hadi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), nomor urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) 6. Ia dicoret dari daftar calon terpilih oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara karena terbukti melakukan praktik politik uang (money politik). Kasus ini berawal dari tindakan Herson Hadi yang

¹⁵ detiksumsel, "Bantahan Caleg Hanura Gorontalo Tarik Bantuan Tandon Air gegara Suara Rendah" selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7225494/bantahan-caleg-hanura-gorontalo-tarik-bantuan-tandon-air-gegara-suara-rendah?single=1>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025.

¹⁶ Kompas TV. *Seorang Warga Mengaku Didatangi Oknum Caleg di Kota Gorontalo Minta Uangnya Dikembalikan*. <https://www.kompas.tv/regional/486385> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025.

memberikan bantuan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C secara gratis kepada sejumlah warga. Bantuan tersebut diberikan dengan syarat agar penerima memilih dirinya dalam Pemilu 2024. Biaya pembuatan SIM ditanggung oleh Haris Hadi, kakak kandung Herson Hadi. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, Herson Hadi diketahui terpilih sebagai anggota legislatif. Namun, beberapa waktu kemudian, ponakan dari Herson Hadi menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penerima bantuan SIM gratis tersebut yang ternyata tidak memilih Herson saat pencoblosan. Mengetahui hal itu, Herson Hadi kemudian mendatangi beberapa warga penerima SIM (yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengannya) dan mengambil kembali SIM yang telah dibuatkan secara gratis tersebut. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial dan diketahui oleh calon legislatif lain yang berada di dapil yang sama. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

5. Penarikan Bahan Material Pembangunan Jembatan oleh Caleg di Kabupaten Gorontalo Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa informan di lapangan bahwa:
 - a. Iwan Jorita seorang Kepala Dusun Sipatana, Desa Lamahu. Menurutnya sebulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif, masyarakat Desa Sipatana secara swadaya membangun jembatan yang menghubungkan wilayah Sipatana dengan Mosoroe. Dalam proses pembangunan tersebut, salah satu calon anggota legislatif (caleg) memberikan bantuan material untuk mendukung kelangsungan pembangunan jembatan tersebut. Namun, setelah pelaksanaan pemilihan legislatif dan caleg tersebut tidak berhasil terpilih, salah seorang pendukungnya bertindak dengan mengambil kembali bantuan material tersebut secara diam-diam pada malam hari tanpa sepengetahuan masyarakat. Kejadian itu baru diketahui keesokan harinya saat masyarakat hendak melanjutkan pekerjaan pembangunan. yang lebih disayangkan, pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan warga setempat, mencerminkan eratnya ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat kita.

¹⁷ Hargo.co.id, "Herson Hadi Batal jadi Aleg Gorut, KPU: Terlilit Hukum, Gantinya Sian Woloks," <https://hargo.co.id/berita/herson-hadi-batal-jadi-aleg-gorut-kpu-terlilit-hukum-gantinya-sian-woloks/>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025.

Setelah kejadian tersebut diketahui, masyarakat kemudian mengembalikan bahan bangunan tersebut kepada caleg yang bersangkutan. Ketika dikonfirmasi, caleg tersebut mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan bahwa bantuan tersebut bukan berasal darinya secara pribadi, melainkan dari atasannya.¹⁸

- b. Menurut Yusuf Mustafa Masyarakat desa Lamahu, sepupu mereka yang bernama Risman (atau Risi) dan Nunang merasa kecewa karena pilihan keluarga mereka dialihkan kepada calon legislatif (caleg) lain. Kekecewaan tersebut mendorong Risman dan Nunang untuk mengambil serta mengangkut kembali bahan bantuan yang sebelumnya diberikan oleh caleg yang mereka dukung. Risman dan Nunang merasa marah karena keluarga mereka, termasuk Kepala Dusun Iwan Jorita dan Yusuf Mustafa, tidak memilih caleg pilihan mereka. Ketegangan sempat memuncak hingga Risman nyaris memukul adik kandungnya sendiri yang bernama Tomi. Akibat konflik tersebut, hubungan Risman dan Nunang dengan anggota keluarga lainnya menjadi renggang dan mereka tidak lagi saling berinteraksi.¹⁹

6. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dari Partai Demokrat membatalkan bantuan ke Masjid di Desa Margo Mulyo. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa informan di lapangan bahwa:

- a. Menurut Tamrin Suratinoyo, Kepala Desa Margo Mulyo, terdapat seorang calon legislatif (caleg) yang membatalkan bantuan untuk pembangunan Masjid Al-Muhajidin. Pembatalan tersebut terjadi setelah hasil pemungutan suara di desa itu tidak memenuhi target suara yang sebelumnya dijanjikan oleh tim sukses caleg tersebut. Tim sukses menjanjikan bahwa caleg tersebut akan memperoleh dukungan suara sebanyak 200 hingga 300 suara di Desa Margo Mulyo. Namun, kenyataannya, setelah pemungutan suara selesai, jumlah suara yang diperoleh oleh caleg tersebut tidak mencapai target tersebut—bahkan tidak mencapai 100 suara. Akibat kekecewaan atas hasil tersebut, bantuan yang sebelumnya dijanjikan untuk pembangunan masjid akhirnya dibatalkan.²⁰

¹⁸ Iwan Jorita, (Kepala Dusun Sipatana, Desa Lamahu), Hasil Wawancara, di Desa Lamahu, 15 Mei 2025.

¹⁹ Yusuf Mustafa, (Masyarakat Desa Lamahu), Hasil Wawancara, di Desa Lamahu, 15 Mei 2025.

²⁰ Tamrin Suratinoyo, (Kepala Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo), Hasil Wawancara, di Desa Margo Mulyo, 16 Mei 2025.

- b. Agung, Kepala Dusun Gunung Sari, Desa Margo Mulyo, mengungkapkan bahwa calon anggota legislatif atas nama Hamdi Mayang membatalkan rencana pemberian bantuan untuk Masjid Al-Muhajidin di desa tersebut. Bantuan yang sebelumnya dijanjikan berupa semen dan besi itu dibatalkan setelah perolehan suara Hamdi dalam pemilu tidak sesuai dengan target yang dijanjikan oleh tim suksesnya. Tim sukses Hamdi sebelumnya menjanjikan dukungan suara sebanyak 200 hingga 300 suara di Desa Margo Mulyo. Target tersebut didasarkan pada hasil pemilu tahun 2019, di mana Hamdi berhasil meraih suara sesuai dengan ekspektasi. Pada pemilihan tahun 2019 itu pula, Hamdi sempat berjanji akan memberikan bantuan rumah kepada masyarakat, namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Pada pemilu 2024, Hamdi kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi dan menjanjikan bantuan untuk Masjid Al-Muhajidin berupa semen dan besi. Namun, setelah penghitungan suara selesai, diketahui bahwa Hamdi hanya memperoleh kurang dari 100 suara, jauh di bawah target. Akibatnya, bantuan yang dijanjikan tersebut dibatalkan. Perselisihan juga terjadi di kalangan tim sukses. Joko, salah satu tim sukses Hamdi, berseteru dengan Agus, tim sukses dari caleg lain. Perseteruan dipicu oleh penempelan stiker caleg yang didukung Agus di tiang listrik yang diklaim oleh Joko sebagai wilayah pengaruhnya. Perselisihan itu bahkan hampir berujung pada perkelahian. Salah satu tim sukses Hamdi lainnya, bernama Sardi, juga sempat bersitegang dengan Agus, namun mereka telah berdamai setelah sekitar satu bulan tidak saling bertegur sapa. Meski demikian, Joko dan Agus—yang sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga—hingga kini masih berseteru akibat perbedaan pilihan politik pada pemilu 2024.²¹
7. Sepasang suami istri berkonflik karena perbedaan pilihan politik pada pemilu tahun 2019, Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa informan di lapangan bahwa:
- a. Fadli Kasim, warga Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, menceritakan bahwa sempat terjadi konflik rumah tangga antara sepasang suami istri di desanya karena perbedaan pilihan calon legislatif (caleg) pada Pemilu. Sang suami memilih caleg bernama Owen, sementara sang istri mendukung caleg bernama Riska. Perbedaan pilihan tersebut memicu pertengkaran hebat hingga sang

²¹ Agus, (Kepala Dusun Gunung Sari Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo), Hasil Wawancara, di Desa Margo Mulyo, 16 Mei 2025.

istri mengusir suaminya dari rumah. Akibatnya, sang suami memilih tinggal sementara di kebun. Setelah hasil pemilihan diumumkan dan diketahui bahwa kedua caleg yang mereka dukung sama-sama terpilih menjadi anggota legislatif, sang istri akhirnya menyesali perbuatannya.²²

- b. Hendra Pulubangga, anggota BPD Desa Tulabolo Timur, mengungkapkan bahwa sepasang suami istri di desanya sempat bertikai hingga hampir bercerai karena perbedaan pilihan calon legislatif pada Pemilu. Sang suami merupakan bagian dari tim sukses calon legislatif Zul Iskandar Suleman dan mengajak istrinya untuk mendukung caleg pilihannya tersebut. Namun, sang istri telah menentukan pilihannya sendiri, yakni caleg bernama Riska. Perbedaan tersebut memicu pertengkaran hebat antara keduanya. Mereka bersikeras mempertahankan pilihannya masing-masing hingga saling mengancam. Sang istri bahkan mengusir suaminya dari rumah jika tidak memilih caleg pilihannya. Ketegangan semakin memuncak karena lahan garapan yang mereka tempati diketahui merupakan milik orang tua dari caleg Riska, pilihan sang istri. Tiga hari setelah pemungutan suara, sang istri akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada suaminya.²³

8. Sepasang suami istri hampir bercerai akibat perbedaan pilihan politik pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa informan di lapangan bahwa:

- a. Kasim Karim, warga Desa Bululi, menceritakan bahwa ia pernah menyaksikan pertengkaran antara seorang suami bernama Bapak Pale, yang biasa dipanggil Opa Pale, dan istrinya, Ibu Dangi atau Oma Dangi. Menurutny, Opa Pale terlihat sangat marah karena Oma Dangi tidak mengikuti keinginannya untuk memilih calon legislatif yang didukungnya. Sebaliknya, Oma Dangi memilih calon sesuai pilihannya sendiri. Karena kecewa dan marah, Opa Pale kemudian meninggalkan rumah dan akhirnya menikah lagi dengan perempuan lain.²⁴
- b. Hartono, warga Desa Bululi, menceritakan bahwa pernah terjadi konflik rumah tangga antara pasangan suami istri yang dikenal dengan sebutan Opa Pale dan Oma Dali.

²² Fadli Kasim, (Masyarakat Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur), Hasil Wawancara, di Desa Tulabolo Timur, 19 Mei 2025.

²³ Hendra Pulubangga, (Anggota BPD Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur), Hasil Wawancara, di Desa Tulabolo Timur, 19 Mei 2025.

²⁴ Kasim Karim, (Masyarakat Desa Bululi, Kecamatan Asparaga), Hasil Wawancara, di Desa Bululi, 20 Mei 2025.

Konflik tersebut dipicu oleh perbedaan pilihan dalam Pemilihan Legislatif. Opa Pale memilih calon legislatif bernama Sunbiki dari Partai Golkar, sementara Oma Dali memilih calon bernama Venni Anwar dari Partai PDI Perjuangan. Perbedaan pilihan ini memicu pertengkaran. Opa Pale memaksa istrinya untuk memilih calon yang ia dukung, namun Oma Dali tetap bersikukuh pada pilihannya sendiri. Karena merasa tidak dihargai dan kesal, Opa Pale mengancam akan mencari istri baru jika Oma Dali tidak mengikuti keinginannya. Ancaman tersebut kemudian benar-benar diwujudkan oleh Opa Pale yang akhirnya menikah lagi, sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka.²⁵

Beberapa kasus ekstrem di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik dapat menyebabkan konflik yang sangat tajam, bahkan sampai memutuskan hubungan kekeluargaan dan merusak keharmonisan sosial. Di Desa Toto Selatan, perbedaan pandangan politik memicu tindakan relokasi makam hanya karena almarhum berbeda pilihan partai politik dengan keluarga pemilik lahan. Dalam kasus lain, bantuan sosial atau pembangunan seperti tandon air, SIM, dan bahan bangunan jembatan serta masjid ditarik kembali setelah caleg tidak memperoleh dukungan suara sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sering kali bersifat transaksional dan penuh syarat politik.

Konflik juga tidak hanya terjadi antara masyarakat dan caleg, tetapi meluas ke dalam keluarga. Di Desa Lamahu, anggota keluarga yang kecewa karena perbedaan pilihan politik bahkan hampir terlibat kekerasan fisik. Demikian pula di Desa Margo Mulyo, perbedaan dukungan politik menimbulkan ketegangan antar tim sukses yang masih memiliki hubungan keluarga. Bahkan dalam lingkup rumah tangga, seperti yang terjadi di Tulabolo Timur, suami istri sampai berkonflik hebat hingga berpisah tempat tinggal karena perbedaan dukungan caleg. Fenomena ini mencerminkan bahwa fanatisme politik yang berlebihan, ditambah dengan praktik politik transaksional, dapat menggerus nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang seharusnya menjadi fondasi kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Politik seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi, bukan menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat.

²⁵ Hartono, (Masyarakat Desa Bululi, Kecamatan Asparaga), Hasil Wawancara, di Desa Bululi, 20 Mei 2025.

D. Kesimpulan

Konflik lahir dari berbagai faktor, seperti latar belakang politik yang berbeda, pengaruh media, identitas kelompok, hingga loyalitas terhadap tokoh tertentu. Dalam keluarga, konflik akibat perbedaan pilihan politik tidak semata-mata mencerminkan perbedaan teknis dalam menentukan siapa yang layak dipilih, melainkan mencerminkan benturan nilai, identitas, dan prinsip yang lebih dalam. Ketika perbedaan ini tidak disikapi dengan toleransi, komunikasi efektif, dan penghormatan terhadap pandangan orang lain, maka relasi emosional dan komunikasi antar anggota keluarga pun ikut terganggu.

Konflik politik yang tidak dikelola dengan bijak dapat menyebabkan keretakan komunikasi, berkurangnya keintiman emosional, dan merusak nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi keluarga. Dampak ini tidak hanya memengaruhi hubungan antaranggota, tetapi juga dapat menciptakan jarak emosional antar generasi, melemahkan ikatan keluarga, dan menimbulkan ketegangan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan keluarga di tengah perbedaan politik membutuhkan kesadaran dan usaha bersama untuk membangun dialog yang sehat, empati, serta saling menghargai agar keluarga tetap menjadi tempat yang aman dan penuh kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Komarudin, & Rahmat, *Dinamika Konflik Generasi dalam Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),
- Mubarok Muhil, *Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik Perspektif Teori Konflik (Studi Di Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya)*, Tesis, Program Pasca Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019
- Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Bawaslu Vol.3 No. 3 2017.
- Saleh Khoirul dan Achmat Munif, *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*, Jurnal Addin Vol. 9, No. 2, 2015,
- Saptenly Buling Nandorari, Aloysius L.S. Soesilo, *Komunikasi dalam Keluarga Tradisional Yang Mengalami Konflik Karena Pilkada di Kabupaten Alor*, Jurnal Psikohumanika, Vol. 13, No 1, 2021,
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994,
- Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Sugitanata Arif & Muannif Ridwan, *Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik*, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 4, no. 1 (2024).
- Qoharuddin, Moch. Azis, *Pemilu Dan Konflik Dalam Keluarga: Menjaga Harmoni Dalam Perbedaan Pendapat*, Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences, Vol. 3, No. 3, 2022,
- detiksulsel, "Bantahan Caleg Hanura Gorontalo Tarik Bantuan Tandon Air gegara Suara Rendah" selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7225494/bantahan-caleg-hanura-gorontalo-tarik-bantuan-tandon-air-gegara-suara-rendah?single=1>.
- Kompas TV. *Seorang Warga Mengaku Didatangi Oknum Caleg di Kota Gorontalo Minta Uangnya Dikembalikan*. <https://www.kompas.tv/regional/486385>
- Liputan 6, *Cerita dibalik Pembongkaran Makam karena Beda Pilihan Caleg di Gorontalo*, (<https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/3869358/cerita-dibalik-pembongkaran-makam-karena-beda-pilihan-caleg-di-gorontalo>)